

Sinopsis

Birokrasi memiliki posisi yang strategis dan sangat urgen untuk menjalankan roda pemerintahan. Dikatakan strategis karena memiliki kedekatan dengan penguasa maupun rakyat, kedekatan dengan penguasa adalah sebagai eksekutor kebijakan dan kepada masyarakat adalah sebagai pelayan publik. Melalui peluang otonomi daerah peningkatan pelayanan diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.. Sragen merupakan daerah yang tepat untuk dijadikan obyek dalam mengembalikan posisi peran birokrasi sesungguhnya. Dilihat dari adanya terobosan baru yakni diterapkannya pelayanan satu atap yang telah mengembalikan citra birokrasi sebagai pelayan publik yang sebenarnya. Kondisi di Kabupaten Sragen sebelum menerapkan reformasi birokrasi yakni waktu dan biaya tidak jelas, pungli dianggap hal yang wajar, proses izin melalui banyak instansi dan berurutan, dan pelayanan yang tidak memuaskan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan beberapa pilar *good governance* yakni masyarakat, Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Sragen. Dan mendeskripsikan perubahan peran birokrasi yang ada di Kabupaten Sragen.

Dari hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sragen mereformasi birokrasi dengan mendirikan Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dan *Re-Engenering* pelayanan publik berbentuk *Unit Marketing* dan *Engenering Service*. Dengan pelaksanaan peran sebagai konsultatif yakni memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan bimbingan teknis dalam arti birokrasi memberikan bimbingan secara teknis bagi masyarakat yang ingin membuka usaha dengan mendatangkan pakar-pakar untuk melaksanakan pembinaan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha baik dalam bidang pertanian maupun perindustria., fasilitatif yakni fasilitator bukan melapas masyarakat namun malah mendampungi dan memberi masukan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang masih kekurangan modal usaha dan administratif yakni birokrasi berperan melayani masyarakat tanpa berbelit-belit yang menacu pada ISO 9001 2000 yang berstandar pelayanan internasional sehingga mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dan untuk meyakinkan bahwa peran birokrasi sangat berpengaruh pada kesejahteraan adalah hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dimana keterkaitan pilar *good governance* juga penting dalam pelaksanaannya. Dampaknya adalah naiknya pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan daerah yakni Tahun 2005 sebesar 72,8 M menjadi 88,4 M pada 2006.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa reposisi birokrasi dapat terlaksana melalui adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi. Faktor yang menjadi penghambat adalah sumber daya manusia yang lemah dan kepastian regulasi yakni terjadinya transisi dari Surat Keputusan Bupati ke Peraturan Daerah. Dan faktor yang mendukung adalah keinginan yang kuat dari internal pemerintahan. Adapun sarannya adalah perlunya peningkatan dalam melaksanakan transfer *knowledge* ke berbagai instansi yang berada diluar daerah sehingga birokrasi bisa melaksanakan fungsinya secara merata ditiap-tiap daerah. Agar tidak menjadi sebuah hambatan perlu adanya *check and balance* antara ekecutif dan legislative daerah dan masyarakat. Reposisi peran birokrasi tidak hanya terjadi pada satu lembaga seperti Badan Pelayanan Terpadu namun bisa